

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT
DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT MASYARAKAT DESA HUTAN
(Studi Kerjasama Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan dengan Masyarakat Desa Hutan Bate
Kabupaten Tuban)**

Ayu Novawana Sabila, Suryadi, Wima Yudho Prasetyo

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang
E-mail :bellasabilla@gmail.com

***Abstrack:** The Implementation of Collaborative Forest Management with Communities Program in creating Sustainable Development of Forest Village Communities (A Studi in Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan with Communities of Desa Hutan Bate Kabupaten Tuban) Along with dinamycs development of Indonesia, the role of forest is important in supporting toincrease the nation's economy. Forest management should be based on Sustainable Development to balance economic aspec, social aspec, and environment aspec. Perum Perhutani BKPH Bate using the Collaborative Forest Management Program (PHBM) to managethe forest. Implementation of this program involving forest communities through LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). The research aims are to determine, describe and analyze how Perum Perhutani BKPH Bate manage the forest with Collaborative Forest Management princip that involving forest communities. In this study, researcher prefer to use aqualitative method research with a descriptive approach and also use a Miles Huberman methods of analysis. And suggestion from the researcher to Forest Communities is to improve the participation in Collaborative Forest Management Program*

***Keywords:** sustainable development, implementation of program*

Abstrak: Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam Mewujudkan Sustainable Development Masyarakat Desa Hutan (Studi Kerja Sama Masyarakat Desa Hutan dengan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Bate Kabupaten Tuban). Seiring dengan dinamika perkembangan pembangunan Indonesia, peran kawasan hutan menjadi penting dalam mendukung peningkatan ekonomi bangsa. Pengelolaan Hutan harus didasarkan pada pembangunan secara berkelanjutan agar terjadi keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perum perhutani BKPH Bate melakukan pengelolaan hutan dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program ini dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat sekitar hutan melalui suatu lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga inilah yang mewadahi masyarakat sekitar hutan dalam melakukan hubungan kerjasama dengan pihak perum perhutani BKPH Bate dalam rangka PBHM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana PerumPerhutani BKPH Bate mengelola hutan dengan prinsip PHBM yang melibatkan masyarakat sekitar hutan.Saran peneliti untuk masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam program PHBM.

Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, implementasi program

Pendahuluan

Hutan mempunyai peran yang penting dalam bidang perekonomian dan lingkungan serta keberlangsungan makhluk hidup. Namun pada kenyataanya keadaan hutan Indonesia dari berbagai sisi ternyata semakin buruk. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ketahun Secara keseluruhan hutan di Indonesia mengalami kerusakan lebih dari 43 juta hektar dengan laju deforestasi 2,83 juta Ha/tahun. Angka tersebut

merupakan prosentase yang tidak sedikit untuk laju sebuah kerusakan. Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi Negara dengan penghasil karbon terbanyak ketiga di dunia. Hal ini karena hutan di Indonesia yang mengalami eksploitasi yang berlebihan dan terus menerus oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian ini akan dibahas mengenai upaya dan strategi penyelamatan hutan secara berkelanjutan (*sustainable development*) dengan berbagai cara dan kebijakan-kebijakan

yang diambil oleh pengelola hutan dalam hal ini Perum Perhutani sebagai penanggung jawab pengelolanya. Penelitian ini dilakukan di kawasan hutan Jawa Timur tepatnya di BKPH Bate KPH Jatirogo Kabupaten Tuban.

Secara keseluruhan kawasan hutan di KPH Jatirogo mempunyai luas 18.763,2 ha yang terdiri dari 7 wilayah kehutanan salah satunya yang menjadi objek penelitian ini adalah BKPH Bate. Secara umum BKPH Bate merupakan kawasan yang masih hijau dengan hutannya yang masih gelap, namun seiring maraknya kasus illegal logging membuat hutan semakin hari semakin terpuruk. Kasus *illegal logging* yang sering terjadi terutama pada lokasi penelitian yaitu di wilayah Bate terjadi secara masal dan besar – besaran dan disertai dengan penyanderaan petugas yang berjaga hutan.

Petugas perhutani yang berjaga pada satu petak sebanyak 3- 4 orang hal ini tidak sebanding dengan jumlah pencuri yang mencapai ratusan dengan alat – alat yang lengkap seperti gergaji, serta benda tajam lainnya. Hal ini membuat pihak perum perhutani tidak mempunyai pilihan lain selain pasrah karena jika melawan para pencuri tidak segan untuk melukai dan melakukan kekerasan. Adanya kejadian seperti ini mendorong pihak perum perhutani untuk membuat suatu kebijakan – kebijakan strategis yang mampu mengatasi hal tersebut. Perhutani sebagai pengelola hutan di daerah tersebut mempunyai peran yang penting dalam penyelamatan hutan sekaligus yang bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan. Oleh karena itu berbagai cara dan pendekatan dilaksanakan dengan tujuan penyelamatan Hutan.

Tinjauan Pustaka

1. Implementasi Program

Sesuai dengan yang tercantum dalam kamus bahasa Indonesia Implementasi program diartikan sebagai pedoman tentang strategi yang akan dijalankan. Jones menyebutkan bahwa program merupakan intisari dari suatu kebijakan. Program juga merupakan bagian untuk mengimplementasikan tujuan. Salah satu model implementasi implementasi program seperti yang dikatakan Korten (Haedar akib 2000:12) Bentuk implementasi program menurut korten harus yang mempunyai kesesuaiann antar komponen.

Fauzi menyebutkan bahwa bentuk impleentasi yang dijelaskan terdiri dari tiga komponenn yang saling berkaitan yaitu, program itu sendiri, pelaksanaan program, dan sasaran. Korten menyebutkan bahwa keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi dari kesesuaiann unsure – unsure tersebut. (2000, h.12). Pertama, kecocokan antara program dengan sasaran, yaitu

kecocokan antara tujuan program dengan kebutuhan kelompok sasaran artinya program tersebut harus sesuai dengan kebutuhan sasaran agar bermanfaat. Kedua, kecocokan antara program dengan organisasi artinya kecocokan antara tugas dalam tujuan program dengan kemampuan organisasi dalam melaksanakann tugas tersebut. Ketiga kecocokan antara sasaran dengan organisasi, kecocokan antara tujuan organisasi dalam mencapai tujuan dengan tindakan sasaran.

2 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Memperhatikan konsep keberlanjutan fungsi terdiri dari tiga hal utama yaitu Keberlangsungan ekonomi yang dimaksudkan sebagai pembangunan yang memberikan keuntungan secara materil secara terus menerus untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan dan menghindari ketidakseimbangan yang bisa mengakibatkan kerugian dalam bidang pertanian. Dalam aspek ekonomi pembangunan berkelanjutan berhubungan dengan peningkatan ekonomi yang berkepanjangan dengan tidak membahayakan alam. Tetapi konsep pertumbuhan ekonomi tersebut mendapatkan kendala bahwa sumber bumi itu terbatas.

Keberlanjutan lingkungan, sistem yang berkelanjutan dalam hal lingkungan harus bisa menstabilkann keadaan dan menghindarkan lingkungan dari eksploitasi alam yang berlebihan. Hal ini juga berhubungan dengan pemeliharaan keanekaragaman hayati , stabilitas udara dan fungsi lainnya yang tidak berhubungan dngan sumber hasil ekonomi

Keberlanjutan sosial. Keberlanjutan sosial dimaksudkan sebagai suatu konsep yang harus mampu mempertahankan kesamaan, dan menghadirkann pelayanan kesehatan, pendidikan dan akuntabilitas publik. Aspek sosial, maksudnya pembangunan yang berhubungan dengan manusia dalam hak interaksi, interelasi, dan interdependensi dan berhubungan dengan aspek budaya. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan tidak hanya dalam hal ekonomi tetapi juga menjaga eksistensi suatu budayaa dalam suatu masyarakat . agar suatu masyarakat bisa bertahan dan tetap menjaga eksistensinya dalam menjalani kehidupan sampai mendatang apapun kondisinya.

3 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pengelolaan Hutan Bersamaa Masyarakat adalah suatu konsep pengolahan sumber hutan dengan bentuk kerjasama antara perum perhutani dengan masyarakat sekitar hutan atau dengan

pihak yang saling bersangkutan dalam rangka mencapai keberlangsungan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang maksimal. (biro kelola SDH 2009:26)

Ruang kegiatan PHBM dalam hutan meliputi: peningkatan terhadap pemnafaatan hutan sebagai wisata dengan pola bisnis. Pengamanan hutan menggunakan pembagian hak, kewajiban dan tanggungjawab yang adil, tambang galian, wisata, pengembangan flora dan fauna serta pemanfaatan sumber air.

Sesuai dengan pada keberanekaragaman yang ada maka PHBM dikembangkan menjadi PHBM plus dengan berbagai kelengkapan yang lebih menunjang. Pengelolaan sumber Daya Hutan besama Masyarakat Plus) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip kerjasama yang saling memberikan keuntungan antara perum perhutani dengan masyarakat hutan atau dengan pihak yang berkepentingan dalam upaya menuju keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber dayaa hutan yang maksimal sehingga diharapkan dengan adanya PHBM dapat memberikan kesejahteraan bagi semua pihak.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan

Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam program ini bertujuan untuk memberikan terobosan – terobosan solusi baru dalam masalah pembangunan masyarakat. Konsep phemberdayaan ini melibatkan masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Sebab pada dasarnya pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat akan mengakibatkan pembangunan tidak sesuai dengan sasaran dan hanya berpusat pada kepentingan pemerintah saja . Diharapkan dengan melibatkan masyarakat ikut serta pembangunan bisa merata sampai ke hal mikro dan semua kalangan masyaraka merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. (Hikmat, 2006).

Menurut Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007) pemberdayaan merupakan sebuah proses dimana masyarakat diberikan wawasan dan pemngetahuan mengenai program – program yang dijalankan oleh pemerintah. Artinya masyarakat diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk kesejahteraan mereka dalam bidang ekonomi , sosial dan lingkungan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah (1) Implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan Bate ; (2) Kendala – kendala yang dihadapi dalam

Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.

Lokasi penelitian ini adalah di Perum Perhutani dan situs penelitian yaitu Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan Bate. Sumber data diperoleh dari data primerdan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan analisis interaktif, Miles dan Huberman (1992, dikutip dari Sugiyono, 2014, h.91)

Pembahasan

1. Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan Bate

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, dan keuntungan untuk semua pihak maupun lingkungan secara berkepanjangan dengan memanfaatkan lahan dengan sebaik – baiknya demi mendapatkan hasil yang maksimal dan sadar akan tanggung jawab masing – masing pihak.

a. Pelaksana Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

• Perum Perhutani

Organisasi Pelaksana Program yang diteliti disini adalah wilayah BKPH Bate KPH Jatirogo dengan Luas Wilayah 3.125,40 ha yang terdiri dari 4 wilayah bagian seperti yang sudah diuraikan pada bahasan sebelumnya. Wilayah BKPH Bate di pimpin oleh seorang Asper (Asisten Perhutani) atau Sinder yang sekaligus bertanggung jawab atas terlaksananya Program PHBM tersebut.Implementasi PHBM ini melibatkan masyarakat yang tergabung dalam lingkup organisasi yang lebih kecil yaitu LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Lembaga inilah yang menjadi media Perum Perhutani BKPH Bate dalam melaksanakan program PHBM.

• Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Lembaga Masyarakat Desa Hutan merupakan sebuah perkumpulan masyarakat yang tinggal sekitar hutan yang sama – sama melakukan pemanfaatan lahan dalam kawasan milik perum perhutani dan bekerja sama dengan pihak perum perhutani sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.

a. Proses/ Tahapan Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

• Sosialisai

Pada tahapan ini pihak perum perhutani BKPH Bate melakukan sosialisasi program pengelolaan hutan bersama masyarakat kepada

masyarakat desa hutan melalui LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Sosialisasi dihadiri anggota LMDH yang didalamnya terdapat tokoh tokoh masyarakat seperti kepala desa, tokoh agama, perwakilan kecamatan dan tokoh – tokoh lainnya. Pihak perum perhutani mensosialisasikan berbagai program yang sudah tertuang dalam pokok tujuan PHBM.

- **Membentuk Forkom PHBM tingkat desa**

Forum komunikasi PHBM merupakan salah satu lembaga pendukung dalam pelaksanaan PHBM. Forum komunikasi PHBM dibentuk disetiap tingkat pemerintahan mulai dari pemerintah desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan propinsi. Secara hukum atau legalnya forum komunikasi bertanggung jawab kepada pemerintah ditingkat mana forum tersebut dibentuk.

Forkom atau Forum Komunikasi disini bertujuan untuk menjembatani hubungan antara masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan dengan pihak perum perhutani mengenai program – program yang akan diimplementasikan

- **Membentuk LMDH dan diakta Notariskan**

Setelah membentuk Forkom tingkat desa langkah selanjutnya yaitu membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Pembentukan LMDH disini dihadiri oleh pihak Perum perhutani, kepala desa, tokoh masyarakat baik tokoh agama, tokoh pemuda, maupun perwakilan dari instansi lain seperti dari kecamatan. Tahapan ini dibentuk kepengurusan Lembaga yang diperoleh dengan cara pemilihan secara langsung oleh pihak – pihak yang terkait seperti perwakilan dari perhutani, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya melalui musyawarah mufakat atau dengan cara voting. Pemilihan dilakukan untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara.

- **Mengajukan Kerjasama dengan Perum Perhutani**

Pembentukan masyarakat desa hutan dilakukan untuk menjalin kerjasama antara pihak perum perhutani dengan masyarakat khususnya masyarakat desa hutan. Kerjasama ini diharapkan mampu memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak. Baik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan.

- **Membuat MOU antara Perum Perhutani dengan LMDH (akta notaris)**

Kerjasama yang diajukan oleh LMDH kepada pihak perum perhutani dibuat dalam surat tertulis dan kemudian di akta notariskan agar

perjanjian tersebut bersifat legal dan mempunyai kekuatan hukum. Sehingga jika dikemudian hari ada pihak yang mempertanyakan tentang perjanjian kerjasama tersebut bisa dibuktikan dengan bukti legal.

- b. Koordinasi**

Koordinasi merupakan salah satu bagian yang penting dalam implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) karena disini melibatkan pihak – pihak lain untuk mendukung terlaksananya program tersebut. Perum Perhutani BKPH Bate dalam Implementasi PHBM telah bekerjasama dengan berbagai pihak. Berikut adalah pihak – pihak yang berkoordinasi dengan perum perhutani BKPH Bate dalam rangka mensukseskan program PHBM

- c. Hasil Implementasi**

Secara keseluruhan tujuan utama dari implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini adalah untuk menjaga keamanan hutan dan meningkatkan produktivitasnya dengan tetap menjaga keseimbangan sosial, ekonomi dan lingkungan. Program ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan tanpa ada salah satu aspek yang dikorbankan. Adanya implementasi program PHBM ini diharapkan hutan tetap aman lestari, pengurangan illegal logging, produktivitas hutan meningkat, masyarakat sekitar hutan menjadi semakin sejahtera, dan lingkungan tetap terjaga.

- d. Tanggapan dan Peran Masyarakat**

Masyarakat merupakan objek dalam implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Pelaksanaanya masyarakat tersebut disatukan dalam suatu lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Lembaga ini dalam program PHBM mempunyai tugas dan fungsi tertentu. Sehingga masyarakat desa hutan disini sekaligus bertindak juga sebagai pelaksana program.

Implementasi Program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) menuai berbagai respon dari berbagai kalangan. Sebagian masyarakat ada yang setuju dengan program pengelolaan hutan bersama masyarakat ada juga yang tidak setuju dengan adanya program tersebut. Kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan program ini termasuk kedalam kelompok yang merasa dirugikan dengan adanya program PHBM ini seperti para pencuri kayu, penadah maupun kelompok lain yang merasa dirugikan.

Sebagian besar kelompok tetap setuju dengan adanya program pengelolaan hutan bersama masyarakat hal ini karena program ini dinilai benar benar mendukung terwujudnya hutan lestari dengan keseimbangan ekosistem lingkungan, sosial, dan ekonomi.

2. Kendala – kendala yang dihadapi dalam implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

Perum perhutani Batedalam hal ini sebagai penanggung jawab terlaksananya program PHBM tersebut agar berjalan sesuai dengan tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam acuan visi dan misi.

Implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini melibatkan perum perhutani BKPH Bate, Masyarakat Desa Hutan, kecamatan, kelurahan, serta pihak – pihak lain yang berkepentingan atas terlaksananya program tersebut. Pihak – pihak tersebut saling berhubungan dan terkait satu sama lain sehingga dalam menjalankan program kadang menemui kendala – kendala.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam mewujudkan *sustainable development* masyarakat Desa Hutan”; ini dapat ditarik kesimpulan yang bisa disajikan berdasarkan fokus penelitian. Berikut beberapa kesimpulan yang peneliti dapatkan yaitu:

1. Implementasi Program Pengolahan Hutan Bersama Masyarakat di Bagian

Kesatuan Pemangkuan Hutan Bate Desa Bate Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban.

Implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang diterapkan di BKPH Bate sudah mencapai hasil yang baik, mulai dari aspek lingkungan, keamanan, kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat mengalami kemajuan yang cukup signifikan.

2. Kendala – kendala yang dihadapi dalam Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan Bate

- a. Kendala Internal : perum perhutani mengalami kendala tentang adanya pegawai yang kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankannya sebagian dari pegawai tingkat Sumberdaya Manusianya kurang dan kekuatan mental untuk menjalankan program kurang sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mereka kurang maksimal.
- b. Hambatan eksternal: Pada implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini hambatan eksternalnya datang dari masyarakat yang tidak setuju dengan adanya program ini. Mereka tetap melakukan illegal logging atau penjarahan liar dengan mencari kelalaiannya petugas, tetapi dengan kegigihan petugas semua usaha tersebut bisa diminimalisir oleh pihak perum perhutani.

Daftar Pustaka

- Arif Rohman. (2009) **Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan**. Yogyakarta, Laksbang Mediatama.
- Perum Perhutani . (2009) **Buku Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan PHBM dan PKBL**. Surabaya, Biro Kelola SDH
- Dephut. (2012) **Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2012** . (internet) . Tersedia di <http://www.dephut.go.id/uploads/files/Buku%20Pemanfaatan%20Final%202012.pdf>. Diambil pada tanggal 22 September 2014
- Fauzi, A. (2004) **Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan**. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haedar akib & Antonius Tarigan. (2000) **Artikulasi konsep implementasi kebijakan: perspektif, model, dan kriteria pengukurannya**. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Hikmat, Hary. (2006) **Strategi Pemberdayaan Masyarakat**. Bandung, Humaniora.
- Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat**, Jakarta. Kementerian Kehutanan
- Permendagri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat**. Jakarta, Kementerian dalam negeri

Undang – Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengertian dan Konsep Kehutanan. Jakarta, Kementerian Kehutanan

Undang – undang nomor 2 tahun 1997 tentang pencemaran lingkungan. Jakarta, Departemen Lingkungan Hidup.